

Penataan Pasar Sebagai Upaya Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Tradisional Sindangkerta Kabupten Bandung Barat

Santy Sriharyati¹, Milla Marlina²

Program Studi Administrasi Bisnis

Politeknik LP3I

e-mail : santy_sriharyati@yahoo.com, millamarlina@gmail.com

Abstrak: Kurangnya koordinasi penataan dan pemberdayaan PKL di wilayah pasar tradisional dikarenakan belum adanya kebijakan pemerintah di daerah yang mengatur penataan dan pemberdayaan PKL, sehingga berdampak pada belum tertanamnya pola perilaku masyarakat yang baik, jumlah PKL dan semakin hari semakin banyak, lokasi keberadaan. Sehingga perlunya kajian Penataan Pasar sebagai Upaya Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Tradisional Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat. Adapun metode pengumpulan data secara umum terbagi dua yaitu pengumpulan data primer (wawancara, observasi lapangan dan penyebaran kuesioner) dan data sekunder. Penataan pedagang di Pasar Tradisional Sindangkerta merupakan salah satu alternatif pemecahan masalah kesemrawutan jumlah pedagang, khususnya PKL. Solusinya antara lain melalui penetapan kebijakan penataan PKL, penetapan lokasi dan atau kawasan tempat berusaha PKL, penataan PKL melalui kerja sama antar pemerintah daerah, pengembangan kemitraan dengan dunia usaha. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengoptimalkan lahan yang dipergunakan untuk kegiatan berdagang dan membatasi kawasan kegiatan pedagang, khususnya agar para pedagang disiplin dalam menempati tempat yang telah disediakan. Arah pengembangan dan transformasi fisik pasar dengan ketentuan SNI 8152 Tahun 2015 tentang Pasar Rakyat. Selain itu, perlunya koordinasi pemberdayaan PKL dilaksanakan melalui penyuluhan, pelatihan atau bimbingan sosial, peningkatan kemampuan berusaha, pembinaan dan bimbingan teknis, fasilitasi akses permodalan, pemberian bantuan sarana dan prasarana.

Kata kunci: *Pasar Tradisional, Pedagang Kaki Lima, Pemberdayaan, Penataan.*

PENDAHULUAN/INTRODUCTION

Di kota-kota besar keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan suatu fenomena. Banyaknya PKL di pusat perkotaan menimbulkan kemacetan arus lalu lintas dan kerawanan keamanan, kegiatan PKL tersebut memanfaatkan daerah milik jalan (damija) dan tempat umum. Hal ini menyebabkan kota menjadi semrawut, tidak bersih, indah, dan nyaman. Selain itu berpotensi menimbulkan kerawanan sosial, sehingga diperlukan penataan PKL di kawasan perkotaan

Apabila tidak dibenahi akan mengganggu pengguna jalan, pejalan kaki menjadi tidak aman. Tidak hanya itu saja pemukiman terdekat sekitar PKL terganggu, selain itu tidak

terdapat tempat berdagang bagi pedagang kecil dan sektor informal. Masyarakat terganggu keamanan dan kenyamanan. Tentu saja para pedagang ini beralih ingin mencari tempat yang strategis (tempat berdagang yang mudah terjangkau konsumen). Sedangkan dari sisi masyarakat menginginkan kelancaran lalu lintas, ketentraman dan keindahan kota. Masyarakat menginginkan fasilitas berdagang yang strategis dan pengaturan lalu lintas.

Peraturan Presiden nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima pasal 6 ayat 1 bahwa “Bupati/Walikota melaksanakan penataan PKL kabupaten/kota di wilayahnya sesuai dengan berpedoman pada kebijakan penataan PKL”. Solusi dalam melaksanakan penataan PKL bisa melalui penetapan kebijakan penataan PKL, penetapan lokasi dan atau kawasan tempat berusaha PKL, penataan PKL melalui kerja sama antar pemerintah daerah, pengembangan kemitraan dengan dunia usaha. Selain itu pada pasal 7 tentang koordinasi

METODE/METHODS

- Pendekatan

Penataan pasar sebagai upaya pemberdayaan PKL Di Pasar Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat merupakan program pembangunan yang berbasis pada masyarakat, dengan pendekatan melalui:

1. Pemberdayaan Masyarakat, dengan menekankan partisipasi aktif masyarakat dalam seluruh aspek implementasi kegiatan (tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan) berdasarkan kesamaan kepentingan dan kebutuhan;
2. Keberpihakan kepada yang miskin, artinya orientasi kegiatan baik dalam proses maupun pemanfaatan, hasil ditujukan kepada penduduk miskin;
3. Otonomi dan desentralisasi, artinya masyarakat memperoleh kepercayaan dan kesempatan yang luas dalam kegiatan baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemeliharaan maupun pemanfaatan hasilnya;
4. Partisipatif, artinya masyarakat terlibat secara aktif dalam kegiatan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemeliharaan dan pemanfaatan, dengan memberikan kesempatan secara luas partisipasi aktif dari perempuan;
5. Keswadayaan, artinya masyarakat menjadi faktor utama dalam keberhasilan pembangunan, baik melalui keterlibatan dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan kegiatan dan pemeliharaan;
6. Keterpaduan program pembangunan, artinya program yang dilaksanakan memiliki sinergi dengan program pembangunan yang lain;
7. Penguatan Kapasitas Kelembagaan, dalam rangka mendorong sinergi antara pmda, masyarakat dan stakeholder lainnya dalam penanganan permasalahan kemiskinan.

8. Kegiatan penataan dilaksanakan sebagai upaya pemberdayaan dan berlandaskan pada pemikiran bahwa pemerintah memberikan stimulasi agar masyarakat mampu dan mau menjadi pedagang yang lebih mandiri, antara lain berupa:

- a. Bantuan pemerintah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, khususnya bagi PKL;
- b. PKL sebagai penggerak ekonomi masyarakat yang perlu diperhatikan oleh pemerintah;
- c. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan perdagangan dan kesadaran masyarakat dalam perilaku jual beli;
- d. Perlunya pengembangan kelembagaan dan pemberdayaan menjadi faktor kunci terwujudnya upaya pembangunan ekonomi masyarakat;

Pada proses pemberdayaan maka diperlukan penguatan kelembagaan dan menggali potensi sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat. Oleh karena itu pada tahap awal diperlukan adanya kelembagaan sebagai wadah, mekanisme maupun aturan kegiatan, dan rencana kegiatan. Pengembangan kelembagaan dan pemberdayaan menjadi faktor kunci terwujudnya upaya pembangunan/peningkatan mutu Penataan Pasar sebagai Upaya Pemberdayaan PKL di Pasar Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat melalui prakarsa mandiri secara berkelanjutan.

- Metode Penelitian

Metode pengumpulan data secara umum terbagi dua yaitu pengumpulan data primer dan data sekunder. Metode Pengumpulan data sekunder merupakan metode mengumpulkan data dari dokumen-dokumen rencana, peraturan perundangan serta data terkait dengan kegiatan perencanaan penataan PKL. Metode Pengumpulan Data Primer, dilakukan dengan teknik wawancara terstruktur, penyebaran kuesioner dan observasi lapangan yaitu sebagai berikut:

1. Wawancara Terstruktur. Metode kualitatif dengan pendekatan grounded. Pengumpulan data primer dengan wawancara terstruktur untuk mendapat informasi terkait penataan pasar. Penentuan responden melalui metode Purposive Sampling yaitu, sampel diambil dengan maksud atau tujuan tertentu, yaitu adalah Bapelitbangda KBB, Camat Sindang Kerta, Lurah, PKL dan tokoh masyarakat dan tokoh agama di Kecamatan Sindangkerta.
2. Observasi Lapangan, dilakukan berupa catatan lapangan dan fisik bangunan saat ini, PKL, pengelola dan pengunjung terkait kegiatan penataan PKL.
3. Penyebaran Kuesioner. Menggunakan kuesioner pertanyaan tertutup kepada PKL dan pengunjung. Teknik pengambilan sampling berdasarkan kesediaan responden untuk mengisi kuesioner di wilayah lokasi penelitian. Jumlah sampel sebanyak 178 pedagang dan 100 pengunjung.

- Metode Analisis

metode analisis yang digunakan pada penelitian ini dengan menggunakan data yang berbeda yaitu sebagai berikut:

1. Metode Analisis Deskriptif Kualitatif, digunakan dalam menganalisis data berupa hasil wawancara dan data hasil observasi lapangan. Data hasil observasi lapangan sebelumnya diolah dalam bentuk tabel dan dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Analisis ini menghasilkan penilaian untuk setiap perencanaan penataan PKL.
2. Metode Analisis Statistik Deskriptif, digunakan untuk menganalisis kuesioner. Melalui kuesioner tersebut akan diketahui perencanaan penataan PKL yang diharapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN/RESULTS AND DISCUSSION

Kondisi Eksisting

1. Luas tanah pasar Sindangkerta yaitu 10.958m^2 , luas bangunan 7110 m^2 dengan Kios sebanyak 55, los 165, PKL temporer 160 total pedagang 380, sedangkan pedagang asongan kurang lebih 40 pedagang dan total jumlahnya adalah 420 pedagang.
2. Kegiatan operasional pasar dilakukan pada hari Senin dan Jumat dilain hari itu lokasi pasar menjadi terminal Sindangkerta. Senin Pukul 03.00 WIB s/d 13.00 WIB dan Jumat Pukul 03.00 WIB s/d 11.30 WIB. Kondisi kemacetan, tidak nyaman hanya terjadi pada hari Senin dan Jum'at. Karena dihari lain para PKL dan pedagang asong berpindah-pindah sesuai hari pasar di beberapa wilayah terdekat lainnya. Jam pasar ramainya pada pukul 04.00 WIB s/d 08.00 WIB, lewat pukul 08.00 WIB pengunjung mulai berkurang. Saat ini belum terstrukturnya pedagang menurut jenisnya.
3. Status Pedagang sebesar 30% Pedagang Sindangkerta dan 70% Pedagang dari Luar Sindangkerta. Sedangkan Status Pengunjung sebesar 60% dari lingkungan Sindangkerta dan 40% dari luar Sindangkerta. Namun begitu pada saat pelaksanaan survey pedagang dari Sindangkerta lebih dominan.
4. Adapun fasilitas yang tersedia di Pasar Sindangkerta adalah fasilitas kios dan los, toilet dan musholah, terletak di samping terminal tipe C Sindangkerta, namun alur jalan yang kecil membuat pembeli sulit bergerak.
5. Kondisi saat ini di Pasar Sindangkerta pada saat hari operasional yaitu kenyamanan pengguna ruang terbuka publik berkurang akibat adanya aktifitas PKL, kapasitas jalan berkurang akibat aktifitas PKL. Penggunaan bahu jalan dan trotoar menyebabkan kemacetan, penataan dan penertiban PKL belum maksimal menyebabkan ketidak teraturan dan kekumuhan ruang terbuka publik.



Gambar 1. Kondisi Eksisting Pasar Tradisional Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat

- a. **Hasil survey kuesioner bagi pedagang antara lain :**Sebagian besar pedagang berasal dari Kecamatan Sindangkerta diatas 90%. Pendidikan terbesar yaitu tamatan SMP sebesar 32%, tamatan SD sebesar 31% dan SMU 29%. Rata-rata usia pedagang yaitu diatas 50 tahun sebesar 33%, usia 41-50 tahun sebesar 29% dan usia 31 – 40 tahun sebesar 26%.Sebesar 74% hanya berjualan sendiri atau tidak mempunyai pegawai dan modal usaha diatas 2 juta rupiah sebesar 70%. Penghasilan pedagang dalam setiap hari sebesar 32% dibawah Rp.500.000, diatas 2jt sebesar 24%, Rp.500.000 sd Rp. 1.000.000 sebesar 23% dan Rp.1.000.000 sd Rp. 2.000.000 sebesar 21%. Jumlah pembeli sebagian besar antara 26 – 50 orang sebesar 43% dan antara 11-25% sebesar 32%. Jam mulai operasi pedagang sebagian pukul 06.00. Sedangkan Jam ramai pembeli yaitu pukul 08.01 hingga 10.00 sebesar 63% dan 06.01 – 08.00 sebesar 28%. Jenis dagangan sebagian besar adalah penjual aneka bahan pokok sebesar 44%, peralatan rumah tangga sebesar 20% dan buah sayuran sebesar 16%
1. Fasilitas paling dibutuhkan yaitu lahan parkir sebesar 94%, sisanya tempat sampah sebesar 4%. Hal yang perlu diatur adalah jenis dagangan 48%, waktu 42%, sarana dagang 8% sisa lainnya.. Kebersihan pasar dinilai cukup baik sebesar 56%, kurang baik 26% dan baik 19%.
2. Pola berjualan 87% berpindah-pindah dan 13% menetap. Alasan berpindah-pindah ke pasar lain, karena hari operasional di pasar sindangkerta hanya senin dan jumat. Sedangkan yang menetap karena lokasi strategis dan memiliki pelanggan tetap.
- b. **Hasil survey terhadap pengunjung antara lain :**
1. Sebagian besar pengunjung berasal dari Kecamatan Sindangkerta diatas 90% yang bertujuan berbelanja diatas 90%. Sebesar 97% adalah ibu rumah tangga. Dengan menggunakan sepeda motor sebesar 71%. Usia pengunjung yaitu usia produktif antara 21 – 50 tahun sebesar 76%. Kunjungan ke pasar 50% seminggu 2 kali sesuai jam operasional Pasar Sindangkerta, sedangkan 21% seminggu 1 kali. Sebesar 51% pengunjung pergi ke pasar lain dan 49% tidak.

2. Alasan belanja ke Pasar Sindangkerta yaitu karena dekat dengan tempat tinggal sebesar 80%. Antisipasi kepadatan pengunjung yaitu dengan mengatur peruntukan kegiatan sebesar 74% dan peran Pemda yang dibutuhkan yaitu penataan sebesar 89%.
3. Pola pengelompokan PKL yaitu dengan cara berkelompok dengan dagangan yang sejenis (zoning) yaitu sebesar 93% dan perlu pengaturan lagi sebesar 97%. Sarana yang perlu diatur yaitu sarana dagang sebesar 73% dan tempat/lokasi usaha sebesar 15%. Fasilitas umum yang perlu ditambah yaitu lahan parkir sebesar 79%, tempat sampah sebesar 8% dan toilet/MCK sebesar 6%. Kebersihan pasar dinilai cukup bersih sebesar 55%, kurang bersih sebesar 29%. Namun ada juga yang berpendapat bersih diluar namun dibelakang banyak sampah sebesar 16%.

c. Aspirasi Parapihak Dalam Penataan PKL di Pasar Sindangkerta

Penataan pedagang di Pasar Tradisional Sindangkerta merupakan salah satu alternatif pemecahan masalah kesemrawutan jumlah pedagang, khususnya PKL. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengoptimalkan lahan yang dipergunakan untuk kegiatan berdagang dan membatasi kawasan kegiatan pedagang, khususnya agar para pedagang disiplin dalam menempati tempat yang telah disediakan.

Secara umum para *stakeholder* menginginkan adanya penataan agar tercipta suatu ketertiban dan kenyamanan bagi semua pihak. Berdasarkan wawancara parapihak didapatkan bentuk penataan PKL, yaitu relokasi di tempat (*in-situ*). Relokasi di tempat (*in-situ*) bentuknya bisa berupa penataan tempat, pengaturan lokasi berjualan berdasarkan jenis dagangan, pengaturan waktu berjualan, pengaturan sarana atau tempat untuk berjualan.

Penertiban ruang fungsional menjadi perhatian penting dalam penataan Pasar Sindangkerta. Saat hari operasional pasar, pedagang kaki lima tumpah ruah menempati halaman pasar bahkan sampai memenuhi jalur pejalan kaki dan halaman pertokoan yang ada di sekitar kawasan. Terminal kendaraan umum yang ada di lahan pasar, ketika hari pasar berpindah tempat ke depan menggunakan bahu jalan. Aktivitas menaiki, menurunkan penumpang serta kegiatan bongkar muat pedagang yang mengakibatkan bertambahnya kemacetan lalu lintas. Keinginan parapihak untuk mengembalikan ruang fungsional sesuai dengan fungsi semula sebagai bagian dari penataan Pasar Sindangkerta.

Penataan Pasar Sindangkerta cukup sering dilakukan, terakhir dilakukan pada tahun 2017/2018 silam. Penataan berupa perbaikan kios, lantai pasar dan hanggar. Berdasarkan hasil pengumpulan data berupa wawancara didapatkan bahwa Pasar Sindangkerta akan masuk kedalam rencana pengembangan Kecamatan Terpadu, dimana pasar tersebut akan di revitalisasi. Hal ini tentu memudahkan untuk dilakukannya penataan PKL, dimana nantinya diharapkan PKL yang selama ini menempati halaman pasar dan ruang fungsional seperti trotoar, dapat ditampung kedalam bangunan pasar setelah direvitaliasi. Dengan dibangunnya kembali Pembangunan fisik pasar Sindangkerta menjadi jawaban terbaik untuk mengatasi masalah Pedagang kaki lima yang selama ini berada di Pasar Sindangkerta dan sekitarnya.

d. Aspek Fisik Dasar Pasar Sindangkerta

No	Aspek Fisik	Rencana Kedepan
1	Aksesibilitas dan sirkulasi	Aksebilitas menuju lokasi pasar mudah dan terjangkau oleh moda angkutan umum
2	Parkir	Perlu adanya design area parkir kendaraan yang efisien. Rencana lahan parkir di tempat kecamatan
3	Area bongkar muat barang	Adanya design khusus area bongkar muat barang sehingga tidak mengganggu aktifitas penjual dan pembeli
4	Zoning	Desain zoning harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat mengakomodir kebutuhan para pedagang yang didukung oleh sistem pendukung kebutuhan zoning yang sesuai, sebagai contohnya adalah label petunjuk zoning pedagang
5	Bentuk penataan sarana usaha pedagang	Untuk penataan jongko untuk area bagian dalam atau hangar sudah tertata, sedangkan penataan jongko PKL yang menempati area halaman depan pasar sangat kurang tertata dan bercampur antar pedagang lain, sehingga timbul kesemrawutan.
6	Drainase	Perlu dibangun drainase yang lebih baik. Saat ini sistem drainase yang ada di Pasar Sindangkerta menggunakan sistem terbuka dan semi tertutup. menggunakan kisi-kisi yang terbuat dari logam sehingga mudah dibersihkan
7	Toilet	Toilet /MCK yang ada di pasar Sindangkerta berjumlah 2 unit. Perlu dibangun dan pemeliharaan yang lebih baik
8	Tempat Pengelolaan Sampah	Permasalahan sampah di Pasar Sindangkerta menjadi permasalahan yang sangat krusial, diperlukan penanganan khusus mengenai sampah bagi <i>stakeholder</i> setempat. Adapun beberapa penanganan yang disarankan diantaranya : Mesin pencacah dan biometa
9	Keselamatan dan keamanan	Perlu adanya design akan kebutuhan alat pemadam berdasarkan jangkauan dan kapasitasnya sehingga dapat menjadi langkah tindak darurat kebakaran

Sumber : Hasil survey lapangan (2019)

e. Usulan Penataan Pedagang Di Pasar Sindangkerta

Ada beberapa teori dan kajian mengenai model penataan PKL di Indonesia diantaranya :

1. Model dengan pendekatan perspektif kebijakan publik. Model ini mengadopsi dari model kebijaksanaan teori Mc Gee dan Yeung (1977) yang meliputi 3 kebijaksanaan yakni kebijaksanaan relokalisasi, kebijaksanaan struktural, dan kebijaksanaan edukatif. Ketiga kebijaksanaan itu diuraikan dari kebijaksanaan yang sifatnya sangat lunak sampai kebijaksanaan yang sangat keras. U.
2. Model penataan PKL yang saat ini sedang dijadikan percontohan oleh kota-kota di Indonesia yaitu model penataan PKL Kota Solo yang dilakukan pendekatan dialogis dan komunikatif yang mengusung misi *nguwongke wong cilik* (memberi martabat pada orang kecil). Model penataannya dilakukan dengan membuat kawasan PKL dan membuat kantong-kantong PKL melalui relokasi, gerobak, shelter, dan tenda.

Usulan penataan pedagang, terutama PKL Pasar Sindangkerta dilakukan secara partisipatif melalui pendataan pedagang dan diskusi yang diinisiasi oleh UPT pasar dan paguyuban pedagang. Kegiatan diawali dengan melakukan pemetaan jumlah pedagang dan PKL Temporer. Program pendataan pedagang dan PKL ini sangat penting dilaksanakan agar mendapat data yang akurat mengenai jumlah pedagang. Tidak hanya jumlah, pendataan ini harus mendapatkan karakteristik ekonomi dan sosial PKL agar memudahkan peta kondisi PKL dan pendekatan penataan yang akan dilaksanakan.

Mengaitkan rencana penataan pedagang Pasar Sindangkerta, khususnya pedagang kaki lima dan rencana pembangunan Kecamatan Terpadu, dimana Pasar Sindangkerta akan dibangun ulang, maka terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan perlu adanya transformasi konsep pasar. Selama ini Pasar Sindangkerta dikenal masyarakat sebagai pasar desa yang beroperasi 2 kali dalam seminggu maka dengan akan dilakukannya revitalisasi Pasar Sindangkerta sebagai bagian dari rencana Kecamatan Terpadu, akan dibuka operasionalnya menjadi setiap hari dengan rencana konsep bangunan bertingkat. Bangunan ini nantinya akan menampung beberapa fungsi didalamnya diantaranya adalah terminal, pasar dan foodcourt. Pasar ini akan menampung semua pedagang pasar dan PKL temporer.

Perlu adanya transformasi konsep pasar ini diharapkan menimbulkan persepsi bahwasanya pasar sekarang adalah: pasar rakyat yang baik secara infrastruktur (Gozales dan Waley, 2012), cakap secara pengelolaan, bermutu dan higienis dalam penyajian bahan pangan lokal (Goldman dan Hino, 2005; Lagerkvist, Okello & Kalanja, 2015), serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Dalam prosesnya penting untuk tetap mempertimbangkan kaitannya dengan elemen sosial dan memperimbangan kepentingan bukan hanya pengelola pasar dan pengunjung, melainkan juga pedagang pasar sebagai penggiat utama dari pasar itu sendiri.

Issue rencana pembangunan Kecamatan terpadu sudah sampai pada stakeholder dan masyarakat sekitar. Seperti cuplikan wawancara dengan Kepala Desa Cintakarya

“..Kemarin saya ke bappeda sudah melihat siteplan untuk pembangunan pasar, dari gambarnya harus di maksimalkan, jangan sampai nanti sudah berjalan banyak perubahan lagi...Intinya saya sebagai wakil dari masyarakat hanya tinggal menunggu pelaksanaannya, menurut saya, siapa yang akan menolak wilayahnya dibangun dan di tata oleh pemerintah, yang intinya, taraf ekonomi warga di Cintakarya meningkat misalnya dari iuran parkir, apapun juga bentuknya pasti tujuannya ada peningkatan/perubahan ekonomi, intinya saya bersyukur atas adanya pembangunan/penataan ini”.

Idealnya penataan pedagang Pasar Sindangkerta, arah pengembangan dan transformasi fisik pasar sebagai solusi penataan pedagang dapat memenuhi ketentuan SNI 8152 Tahun 2015 tentang Pasar Rakyat.

Persyaratan umum dan persyaratan teknis yang diatur oleh ketentuan SNI pasar rakyat dalam hal ini adalah persyaratan yang sangat ideal untuk mewujudkan pengembangan sebuah pasar rakyat. Pasar yang baik idealnya harus memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam SNI pasar rakyat tersebut. Dengan memenuhi ketentuan di atas, asumsinya transformasi konsep dan identitas pasar adalah berubahnya citra dan kesan pasar yang identik dengan kotor, becek, semrawut, bau, gersang, dan kumuh menjadi pasar yang bersih, nyaman, dan tepat ukur. Jika ketentuan ini diterapkan, kedepannya Pasar Sindangkerta mampu memberikan kenyamanan, keamanan, kebersihan kepada masyarakat, memiliki sanitasi yang baik, maka Pasar Sindangkerta akan menjadi pasar yang sehat.

Beberapa indikator kriteria untuk penataan Pasar Sindangkerta untuk mencapai tujuan pasar sehat yang mengikuti ketentuan SNI. Alternatif kegiatan yang dapat diimplementasi dalam rangka penataan Pasar Sindangkerta antara lain :

No	Kegiatan	Pelaksanaan/Cara/Metode
1	Penetapan kebijakan penataan PKL	Melalui kerja sama antar pemerintah daerah, pengembangan kemitraan dengan dunia usaha dalam penetapan lokasi dan atau kawasan tempat berusaha PKL
2	Koordinasi pemberdayaan PKL	Melalui penyuluhan, pelatihan atau bimbingan sosial, peningkatan kemampuan berusaha, pembinaan dan bimbingan teknis, fasilitasi akses permodalan, pemberian bantuan sarana dan prasarana
3	Penataan pedagang	Mengoptimalkan lahan yang dipergunakan untuk kegiatan berdagang dan membatasi kawasan kegiatan pedagang, agar para pedagang disiplin dalam menempati tempat yang telah disediakan

4	Penertiban ruang fungsional	Keinginan para pihak untuk mengembalikan ruang fungsional sesuai dengan fungsi semula sebagai bagian dari penataan Pasar Sindangkerta
5	Optimalisasi ruang untuk pedagang	Tanpa mengurangi area dan fungsi ruang terbuka publik, karena area tersebut digunakan juga oleh kelompok pengguna yang lain.
6	Pendataan dan pemetaan pedagang dan PKL	Melalui metode partisipatif yaitu pendataan pedagang dan diskusi yang diinisiasi oleh UPT pasar dan paguyuban pedagang. Kegiatan ini bertujuan agar mendapat data yang akurat mengenai jumlah pedagang. Tidak hanya jumlah, pendataan ini harus mendapatkan karakteristik ekonomi dan sosial PKL agar memudahkan peta kondisi PKL dan pendekatan penataan yang akan dilaksanakan
7	Transformasi konsep pasar	Dilakukannya revitalisasi sebagai bagian dari rencana Kecamatan Terpadu, akan dibuka operasionalnya menjadi setiap hari dengan rencana konsep bangunan bertingkat. Bangunan ini nantinya akan menampung beberapa fungsi didalamnya diantaranya adalah terminal, pasar dan foodcourt. Persepsi pasar kedepannya adalah: pasar rakyat yang baik secara infrastruktur, cakap secara pengelolaan, bermutu dan higienis dalam penyajian bahan pangan lokal, serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Dalam prosesnya penting untuk tetap mempertimbangkan kaitannya dengan elemen sosial dan memperimbangan kepentingan bukan hanya pengelola pasar dan pengunjung, melainkan juga pedagang pasar sebagai penggiat utama dari pasar itu sendiri.
8	Arah pengembangan dan transformasi fisik pasar dengan ketentuan SNI 8152 Tahun 2015 tentang Pasar Rakyat	Pasar yang baik idealnya harus memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam SNI pasar rakyat tersebut. Pasar Sindangkerta mampu memberikan kenyamanan, keamanan, kebersihan kepada masyarakat, memiliki sanitasi yang baik, maka Pasar Sindangkerta akan menjadi pasar yang sehat. Beberapa indikator kriteria untuk penataan Pasar Sindangkerta untuk mencapai tujuan pasar sehat yang mengikuti ketentuan SNI.

KESIMPULAN/CONCLUSION

Secara umum para stakeholder baik itu pedagang, pengunjung maupun aparat pemerintah menginginkan adanya penataan agar tercipta suatu ketertiban dan kenyamanan bagi semua pihak. Berdasarkan wawancara para pihak didapatkan bentuk penataan PKL, yaitu relokasi di tempat (in-situ). Relokasi di tempat (in-situ) bentuknya bisa berupa penataan tempat, pengaturan lokasi berjualan berdasarkan jenis dagangan, pengaturan waktu berjualan, pengaturan sarana atau tempat untuk berjualan.

REFERENSI/REFERENCE

- [1]Mardikanto, Totok. (2012). *PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- [2]Mikkelsen, Britha. (2011). *Metode Penelitian dan Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan, Sebuah Buku Pegangan bagi Para Praktisi Lapangan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- [3]Mustafa, Ibrahim. (2011). “Konsep Penataan Ruang Pedagang Kaki Lima di Pantai Kering Kelurahan Watampone Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone”. Makassar: UIN Allaudin.
- [4]Rasdiana. (2013). “Tinjauan Pedagang Kaki Lima Pasar Senggol Dan Sekitarnya Di Kota Parepare”. Makassar: Universitas Hassanudin.
- [5]Ratu Arum, S (2016). “Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional Di Pasar Bandung Kota Tangerang”. Serang: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- [6]Sugiono (2017). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- [7]Sugiyono (2018). “Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)”. Bandung: Alfabeta.